

BAB 2

HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA - SINGAPURA

Hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura dilakukan secara resmi pada bulan September 1967, yang dilanjutkan dengan pembukaan kedutaan besar masing-masing negara. Secara politik, pada dasarnya hubungan Indonesia dan Singapura mengalami *fluktuasi* didasarkan isu permasalahan menyangkut kepentingan nasional masing-masing negara, namun demikian kedua negara memiliki fondasi dasar yang kuat untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan kedua negara yang lebih konstruktif, pragmatis dan strategis.

Indonesia dan Singapura masing-masing memiliki peran yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara khususnya dalam efektivitas ASEAN, meskipun kedua negara ini memiliki luas territorial, jumlah populasi, serta pertumbuhan ekonomi yang sangat berbeda. Hubungan bilateral Indonesia dan Singapura telah menunjukkan peningkatan di berbagai bidang kerjasama terutama hubungan kerjasama politik, hubungan kerjasama ekonomi dan hubungan kerjasama sosial budaya. Selain itu kunjungan antara sesama pejabat pemerintah maupun swasta di kedua negara telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan hubungan kerjasama dan peningkatan investasi di kedua negara.

Hubungan bilateral Indonesia dan Singapura yang erat dan produktif mutlak diperlukan dan harus terus diupayakan guna menunjang upaya pembangunan nasional, khususnya dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam kaitan ini, terdapat komplementaritas kepentingan diantara kedua negara. Di satu pihak, Singapura memiliki kapital dan keahlian yang diperlukan untuk pembangunan Indonesia, namun sebagai negara kecil, Singapura tidak mempunyai luas wilayah (*space*), sumber daya alam (*natural resources*) dan sumber daya manusia (*manpower*) yang mencukupi untuk dapat ditawarkan oleh Indonesia, yakni dalam konteks hubungan yang setara, adil, dan menguntungkan.

Sebagai salah satu negara tetangga terdekat secara geografis, Indonesia dan Singapura perlu membina dan memperkuat hubungan bilateral yang seimbang dan saling menguntungkan berdasarkan prinsip-prinsip kesamaan kedaulatan, non-intervensi, penghormatan terhadap kemerdekaan politik serta integritas wilayah masing-masing. Dalam kaitan ini, hubungan Indonesia dan Singapura yang erat tersebut jelas diperlukan guna menciptakan lingkungan eksternal yang menunjang bagi kepentingan keamanan dan pembangunan nasional RI.

Kerangka hubungan kerjasama Indonesia dan Singapura tersebut di atas, telah menjadi landasan dasar bagi pengembangan hubungan bilateral Indonesia dan Singapura yang lebih mengikat, salah satunya melalui kunjungan antara Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan kedua negara yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan substansial untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan kerjasama bilateral kedua negara.

Dalam bidang politik, paralelisasi antara tiga perundingan perjanjian yakni perjanjian pertahanan, perjanjian ekstradisi, dan *counter terrorism* mengindikasikan hubungan yang baik dan sekaligus mengundang pro dan kontra dari berbagai elemen. Pada perjanjian di bidang politik dan perjanjian di bidang Pertahanan, langkah simbolis dalam Pertemuan Langkawi 14-15 Mei 2007 mengejutkan berbagai pihak. Dua minggu sebelum KTT ini orang dikagetkan akan lompatan hubungan Indonesia dan Singapura, yaitu dengan diselesaikannya Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerjasama Pertahanan (DCA). Tampak Siring menjadi saksi sejarah berikutnya setelah Langkawi. Tampak Siring mengakhiri penantian itu. 30 tahun berlalu sudah, ditutup dengan penandatanganan perjanjian pada tanggal 27 April 2007.

Perjanjian ekstradisi yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura pada 27 April 2007 lalu juga merupakan angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan ekonomi di Indonesia. Perjanjian ini akan menjadi malapetaka bagi tersangka kasus BLBI yang berlindung atas ketiadaan kesepakatan kedua negara mengenai ekstradisi seperti: Sjamsul Nursalim, Bambang Sutrisno, Andrian Kiki Ariawan, Samadikun Hartono,

Prajogo Pangestu, Hendra Rahardja, Sherny Konjongiang, Eko Adi Putranto, dan David Nusa Wijaya (*ICW*, 2003). Ditambah lagi dengan rencana akan diterapkannya prinsip berlaku surut dalam perjanjian ini, tentunya akan semakin menambah daya untuk memaksa pulang para buronan BLBI ke Indonesia. Selain itu, juga akan berpotensi untuk mengembalikan uang rakyat yang mereka bawa lari yang jumlahnya sangat besar, yaitu Rp 180 trilyun (*Kompas*, 23 Januari 2003) dan dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, perjanjian ekstradisi ini akan membawa dampak yang jauh lebih besar daripada hanya sebagai langkah pemberantasan korupsi.

Selain menjadi angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi, perjanjian ekstradisi ini juga akan membawa dampak positif bagi usaha agar tidak terjebak dalam krisis lagi. Upaya penegakkan hukum (pemberantasan korupsi) merupakan tahapan penting bagi proses ini, terutama pelaksanaan proses hukum bagi koruptor yang lari ke luar negeri (Singapura). Hal ini terkait dengan usaha pengembalian aset-aset negara di luar negeri yang dimungkinkan bila para koruptor bisa dipulangkan dan diproses secara hukum. Hal itu sulit dilakukan karena sebagian besar koruptor melarikan diri ke luar negeri beserta uang jarahannya. Besarnya *capital outflow* yang merupakan indikasi larinya uang rakyat ke luar negeri karena terjadi bersamaan dengan proses restrukturisasi perbankan bisa terlihat dalam kasus ini.

Berbicara mengenai perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura, maka sejarah panjang ke arah ini terbentang lebar sejak tahun 1964 hingga ketika mencuatnya kasus penggelapan dana BLBI. Proses-proses yang mengikutinya menjadikan hubungan Indonesia dan Singapura mengalami pasang-surut. Politik konfrontasi dengan Malaysia, kerusuhan berbau rasis, hingga sikap curiga Pemerintah Singapura terhadap Indonesia ketika Timor-Timur berintegrasi dalam pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-bangsa. Pasang-surut hubungan Indonesia dan Singapura yang disebabkan oleh ketiadaan perjanjian ekstradisi diantara kedua negara ini berjalan sepanjang sejarah berdirinya negara Singapura pada tahun 1965.

Dalam banyak hal, sejarah panjang ketiadaan perjanjian bilateral (ekstradisi) antara Indonesia dan Singapura ditengarai dilatarbelakangi oleh benturan kepentingan ekonomi-politik kedua negara. Indonesia berkepentingan dalam upaya perbaikan reputasi dengan mengedepankan upaya supremasi hukum (pemberantasan korupsi), sedangkan Singapura berkepentingan untuk menjaga reputasi mereka sebagai salah satu pusat keuangan dunia yang menganut prinsip, dana bisa masuk dan keluar dengan bebas, termasuk dana konglomerat dari Indonesia.

Dalam perjalanan waktu, ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura seringkali menjadi kendala bagi kedua negara untuk mencapai kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, kedua negara seringkali menggunakan wadah kerjasama multilateral (terutama ASEAN) sebagai wadah untuk berkomunikasi dan memanfaatkan keberadaan Interpol untuk menangani kasus-kasus kejahatan trans-nasional. Efektivitas kedua upaya ini tentunya tidak begitu signifikan, terkendala oleh masalah perbedaan sistem hukum dan kedaulatan masing-masing karena tembok tebal masih menutupinya untuk menuju proses yang lebih jauh lagi.

2.1 Gambaran Umum Singapura

Singapura adalah negara tetangga yang kerap kali menjadi harapan Indonesia tentang bagaimana sebuah pembangunan hendaknya dijalankan di negara ini. Singapura terletak di penghujung Semenanjung Malaysia, berdekatan dengan negeri Johor Darul Takzim (Malaysia) dan Kepulauan Riau (Indonesia), dengan luas wilayah 692.7 km². Singapura merupakan negara bekas jajahan Inggris sejak 1819 dan menjadi bagian dari negeri-negeri Selat (*Straits Settlement*) bersama pulau Pinang dan Malaka. Singapura memperoleh kemerdekaannya pada 9 Agustus 1965, dan semakin berkembang menjadi pusat perekonomian di kawasan Asia Tenggara bahkan menjadi salah satu macam Asia. Hingga saat ini Singapura masih menjadi salah satu negara makmur di kawasan Asia. Kemajuan Singapura ini ditandai dengan anggaran pendidikan yang sangat tinggi, program

perumahan yang berhasil, tingkat korupsi dan kriminalitas yang sangat rendah karena penerapan hukum yang tinggi⁵.

Upaya untuk mencari keselamatan (*survival*), ketertataan (*order*), dan kemakmuran adalah tema dominan dari politik Singapura. Sejak masih dalam jajahan Inggris, tema-tema tersebut sudah menjadi perhatian dalam kebijakan pemerintah, dan hal itu berlanjut ketika memutuskan untuk bergabung dengan Malaysia pada tahun 1963. Ancaman terhadap keselamatan Singapura masih terus berlanjut, yaitu ketika menghadapi dampak konfrontasi Indonesia dengan Malaysia.

Untuk menghadapi lingkungan regional yang tidak bersahabat (dikelilingi oleh negara besar dengan mayoritas penduduknya beragama Islam), Singapura membangun kebijakan ekonomi yang cepat yang didasarkan atas lingkungan domestik yang didesain kondusif, dan berjangkauan luas untuk menjamin kedaulatannya. Sejak tahun 1969, Singapura mampu mengonsolidasikan kemerdekaan, stabilitas, dan kelangsungan hidupnya hingga sekarang. Keberhasilan ini tidak lepas dari keberhasilan ekonomi dan penanaman nilai masyarakat Singapura yang terdidik dan berkualitas (*Singapore Meritocracy*).

Dengan keterbatasan yang dihadapi oleh Singapura, baik dari sumber daya alam, luas wilayah, dan posisi geopolitiknya yang tidak menguntungkan karena menjadi lokasi strategis dunia sekaligus ajang perebutan pengaruh, pemerintah Singapura menyusun kebijakan Politik Luar Negerinya (PLN) dengan tujuan:

1. *National Security* bahwa letak yang terjepit serta luas wilayah yang sempit merupakan faktor yang dominan yang tidak menguntungkan bagi pertahanan dan keamanannya. Oleh karena itu, Singapura selalu was-was terhadap Indonesia maupun Malaysia dimana hubungan kedua negara tersebut dengan Singapura pernah tidak harmonis. Untuk mengantisipasinya, Singapura mengembangkan gagasan pertahanan Pakta Asia Tenggara yang menekankan syarat negara-negara Asia Tenggara tidak akan mengubah tapal

⁵ Agus Suryana, *Profil Negara: Negara Macan Asia, Nafta & Uni Eropa* (Jakarta: Harapan Baru, 2005)

batas dengan kekerasan dan negara-negara besar menjamin keamanan Asia Tenggara, menawarkan pangkalan militer bagi AS, meningkatkan kualitas militernya, mendukung ZOPFAN, dan tetap bergabung dengan *British Commonwealth*.

2. *National Building* bahwa integrasi nasional merupakan masalah tersendiri yang dihadapi Singapura karena penduduknya yang multietnis. Singapura menekankan pada Malaysia dan Indonesia bahwa meskipun China merupakan etnis mayoritas tetapi Singapura bukanlah negara China ketiga.

3. *Economic Survival* bahwa dengan keterbatasan sumber daya alam, Singapura mengandalkan kebutuhannya dari negara lain bahkan hal yang vital sekalipun seperti supply air dari Malaysia. Singapura memanfaatkan letaknya yang strategis sebagai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia dengan membuka pelabuhan bebas dunia dan enterport. Selain itu, Singapura memanfaatkan pembangunan industri manufaktur sebagai tiang perekonomiannya yang kedua, yang bersifat orientasi ekspor, padat karya dan padat modal.

Singapura merupakan negara dengan kepercayaan-diri (*self-confidence*) yang sangat tinggi. Mereka terus belajar dari krisis yang dihadapinya pada masa lalu, dan selalu mampu mengambil manfaat terbaik dari situasi apa pun yang terjadi di lingkungan internasional. Sepanjang kepemimpinan Lee Kuan Yew (1959-1990), pemerintahan Singapura berjalan di atas prinsip-prinsip “demokrasi otoriter”. Konsep kepemimpinan “demokrasi otoriter” adalah sebuah pemerintahan yang sangat profesional dalam bekerja. Singapura dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang sangat kharismatis. Prinsip *leadership*-nya sangat sanggup mengelola negaranya secara modern. Walaupun peranan pemerintah sangat dominan, bahkan seringkali dikritik sebagai totaliter, namun, model pembangunan yang khas Singapura ini mampu menyejahterakan rakyatnya. Kemampuan menyejahterakan rakyat bertolak ukur dari keberhasilan ekonomi yang tidak terbantahkan, bahkan dengan standar negara maju

sekalipun.

Singapura sangat bergantung pada pasar dunia dan investasi asing untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Untuk itu, Singapura perlu membentuk situasi yang kondusif bagi kelancaran arus investasi ke dalam kawasan terutama negaranya dengan membentuk keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara dan kerjasama regional. Singapura juga menggunakan ASEAN sebagai instrumen politik luar negerinya di kawasan regional untuk meminimalisir ancaman maupun kerjasama dalam meningkatkan pembangunan nasionalnya. Karakter lain dari politik luar negeri Singapura adalah pragmatisme, anti komunis dan pro Barat, perimbangan kekuatan di Asia Tenggara, regionalisme, komitmen pada perdagangan bebas, penanganan ketergantungan eksternal, pembentukan identitas nasional Singapura, dan menunjukkan otonomi Singapura dalam peta politik Internasional.

2.1.1. Gambaran Keberhasilan Singapura di Berbagai Bidang

Beberapa bukti yang keberhasilan Singapura dalam berbagai bidang menunjukkan bahwa negara kecil ini adalah mitra yang mau tak mau kekuatannya harus dipelajari dengan pijakan hati yang jernih dan jujur.

1. Bidang Diplomatik

Hingga tahun 2000, reputasi Singapura dibuktikan oleh kecakapan dan kemampuannya melakukan hubungan diplomatik dengan 158 negara.

Kerjasama multilateral yang dilakukan oleh Singapura antara lain :

- a. *Association of South-East Asian Nations (ASEAN)*;
- b. *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*;
- c. *ASEAN Regional Forum (ARF)*;
- d. *Asia-Europe Meeting (ASEM)*.

Dengan sumber daya manusia (SDM) Singapura yang sangat terbatas, semua kegiatan tersebut dikoordinasikan melalui 37 misi diplomatik yang

tersebar di seluruh dunia⁶. Patut diketahui, dibandingkan dengan negara-negara pendiri ASEAN lainnya, misi diplomatik yang dikembangkan oleh Singapura termasuk yang terkecil. Namun, uniknya, misi diplomatik yang kecil tergolong ini paling aktif dalam mengikuti kegiatan nasional dan internasional, di mana pun mereka ditempatkan.

2. Bidang Pertahanan

Secara konsisten, Singapura mengikuti model pertahanan Israel. Dengan hanya berawakkan 50.000 tentara profesional, namun didukung oleh 250.000 penduduk yang terlatih. Setiap warga negara yang sudah berusia 18 tahun ke atas wajib mengikuti wajib militer antara 24-30 bulan. Wajib militer ini kemudian dilanjutkan oleh latihan teratur hingga mereka berusia 45 tahun. Singapura memiliki akses pelatihan militer di Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Brunei, New Zealand, Perancis, Taiwan, dan Thailand. Untuk menghadapi kemungkinan terburuk, Singapura mengandalkan sistem persenjataan modern, sistem pelatihan tempur modern, serta kemampuan membuat senjata secara mandiri. Pada 1999, anggaran pertahanan Singapura tiga kali lipat lebih besar daripada anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpenduduk 210 juta⁷.

3. Bidang Sumber Daya Manusia

Masyarakat Singapura berjiwa ekonomi yang sangat kuat. Jiwa ekonomi ini disertai oleh kemampuan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berstandar internasional. Kemampuan dasar inilah yang memungkinkan Singapura menjadi negara terkemuka di bidang jasa perhubungan, terutama sekali dalam aspek-aspek yang berhubungan dengan transportasi laut dan udara⁸. Karena sistem pendidikan yang digunakan menggunakan konsep dan metode modern, sudah merupakan pengetahuan umum bahwa mahasiswa Singapura yang kuliah di luar negeri umumnya kritis, cekatan, dan kompak.

4. Bidang Politik Luar Negeri

⁶ Leifer, Michael, *Singapore's Foreign Policy: Coping with Vulnerability* (New York: Routledge, 2000), hal. 3

⁷ *Ibid.*, hal. 16

⁸ *Ibid.*, hal. 17

Di bidang politik luar negeri, Singapura mempraktikkan sebuah model yang sangat khas. Kekhasan ini terletak pada ciri-ciri berikut:

- a. Pragmatis dengan menghargai perkembangan apa pun seperti apa adanya, dan terbebas dari ideologi atau dogma manapun;
- b. Waspada atas perubahan apa pun di tingkat dunia, seperti perubahan struktur politik dan ekonomi global;
- c. Perencanaan ke depan dilakukan melalui berbagai pengkajian skenario masa depan sehingga memaksa Singapura untuk terus bertahan dalam situasi terburuk sekalipun;
- d. Kemampuan meminjam kekuatan lawan, seperti mengangkat Konsul Kehormatan di wilayah-wilayah yang belum ada Kedutaan Besar Singapura, serta Duta Besar keliling yang tidak tinggal di Singapura⁹.

5. Bidang Pemerintahan

Di bidang pemerintahan, Singapura memiliki tata pemerintahan yang sangat baik. Hal ini dibuktikan oleh eksistensi unsur-unsur:

- a. Kepemimpinan yang sangat berkompeten dan berani;
- b. Kaderisasi yang dilakukan secara terus menerus;
- c. Sinergi antara pemerintah, buruh, dan manajemen;
- d. Kecenderungan mengambil keputusan secara konsensus dengan melibatkan masyarakat luas¹⁰.

Perkembangan Singapura yang sangat mencengangkan itu, tak urung, telah menarik hati banyak pengamat dan pemimpin dunia. Pada umumnya, komentar beberapa tokoh dunia itu berkomentar sangat positif. Bagi mereka, perkembangan Singapura selama dipimpin oleh Lee Kuan Yew (1959-1990) mengalami perkembangan yang spektakuler.

2.2 Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Singapura

⁹ Koh, Tommy, *The Quest for World Order: Perspectives of a Pragmatic Idealist*. (Singapore: The Institute of Policy Studies, 1998), hal. 215

¹⁰ *Ibid.*, hal. 208

Hubungan bilateral Indonesia dan Singapura pada awalnya dimulai dengan saling curiga dan ketakutan Indonesia untuk ‘diakali’ oleh Singapura. Akan tetapi hubungan tersebut kemudian mengalami perkembangan, sehingga kemudian tumbuh hubungan yang didasarkan atas kesadaran kedua belah pihak adanya sifat saling membutuhkan. Hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura dibangun bukan hanya karena faktor geografis yang berdekatan tapi juga faktor sejarah. Berbagai ranah kerjasama dibangun atas nama kepentingan negara baik dalam bidang ekonomi maupun bidang politik.

Pada bulan Agustus 1965, Singapura lepas dari Malaysia dan merdeka. Kemudian menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Namun, pada tahun 1968 hubungan antara kedua negara tersebut memburuk karena tindakan pihak Indonesia pada waktu itu berkonfrontasi dengan Singapura. Pada saat itu kondisi hubungan antar kedua belah negara mencapai titik yang terendah. Perlu lima tahun untuk memperbaikinya. Hubungan antara Indonesia dan Singapura membaik pada tahun 1973. pada saat itu Indonesia mengundang Perdana Menteri Lee Kuan Yew untuk datang ke Indonesia dan akhirnya Singapura mengunjungi Indonesia yang segera dibalas Indonesia dengan tindakan Presiden Soeharto yang mengunjungi Singapura. Setelah kejadian tadi, hubungan antara kedua negara membaik dengan ide dari Singapura untuk menjalin kerjasama ekonomi bilateral dengan Indonesia.

Pada tahun 1975 diadakan pemungutan suara terhadap tindakan Indonesia yang menginvasi Timor-Timur, Singapura menyatakan abstain. Namun pada tahun 1977 Singapura beserta negara ASEAN lain mendukung Indonesia dalam rangka menasionalisasikan Timor-Timur. Hal ini menjadi titik kerjasama yang lebih antara Indonesia dengan Singapura. Hal ini ditandai dengan kerjasama perdagangan yang terpusat di selat melaka khususnya pulau batam. Dalam kerjasama ekonomi ini, pulau batam dijadikan sebagai puast industri dan perdagangan oleh Indonesia dan pusat investasi Singapura terhadap Indonesia. Pada tahun 1990 terjadi kesepakatan pembangunan Pusat Industri Batam antara Indonesia dengan Singapura yang bernilai 400 juta dollar. Selain itu pajak ganda

perdagangan juga dihapuskan dan kedua negara juga mendorong kerjasama dalam bidang pariwisata.

Perkembangan kerjasama ekonomi membawa pada meningkatnya tuntutan akan keamanan. Akhirnya pada tahun 1989 disepakati MoU antara Indonesia dengan Singapura yang memberi izin bagi militer Singapura untuk berlatih ke Indonesia dan Indonesia berhak menerima teknologi militer dari Singapura. Selain itu terjadi latihan militer gabungan yang diadakan secara rutin. Mengenai kerjasama militer ini, terjadi gejolak internal dalam pemerintahan Indonesia tidak berkeberatan apabila itu bukan pangkalan militer, para pemimpin militer pun kritis dalam menganggapi hal ini. Pangkalan militer asing akan mengancam kedaulatan Indonesia.

Hubungan itu tersebut bisa berlangsung harmonis dan produktif bila kedua negara bisa memaksimalkan dan mempertahankan hubungan yang sudah baik, dan meminimalkan atau menghilangkan ganjalan yang masih ada. Namun, hubungan Indonesia dan Singapura merupakan sebuah gambaran yang “agak jomplang”. Disebut “agak jomplang” karena Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas, sumber daya alam yang melimpah dan beragam potensi lainnya, tetapi seperti tidak berdaya. Sementara Singapura yang wilayahnya hanya sebesar sebuah kota sehingga layak disebut *city-state* justru berada dalam posisi pengendali, bukan yang dikendalikan, karena Singapura menguasai teknologi komunikasi, teknologi informasi, dan teknologi transportasi yang canggih.

Selama ini hubungan Indonesia dan Singapura cukup baik dengan terjalannya kerjasama regional (ASEAN, NAFTA, ARF, ASF, AMF, ASEAN+3), kerjasama multilateral (PBB, GNB, APEC, WTO, G77), dan kerjasama bilateral. Pada masa Orde Baru hubungan kedua negara bersifat saling membutuhkan yang ditandai dengan banyaknya pembangunan proyek bersama dan besarnya investasi Singapura ke Indonesia. Dalam bidang ekonomi, Indonesia dan Singapura telah membentuk kerjasama segitiga ekonomi : SIJOURI (Singapura-Johor-Riau).

Perkembangan hubungan Indonesia dan Singapura pasca krisis moneter

1997, terlihat sikap inkonsistensi dan arogansi sepihak Singapura yang dapat mengancam stabilitas regional maupun hubungan baik kedua negara, seperti pada permasalahan perjanjian ekstradisi dan pembangunan kekuatan militer Singapura secara besar-besaran. Luas wilayah Singapura yang kecil dan perekonomiannya yang maju di lain sisi berakibat pada sikap tidak toleran pada negara-negara tetangganya, dimana pemerintah Singapura merasa bahwa negaranya membutuhkan keamanan yang ekstra.

2.2.1. Hubungan Indonesia dan Singapura dalam Bidang Ekonomi

Pada dasarnya kedua negara memiliki tingkat komplementaritas ekonomi yang tinggi. Di satu sisi, Singapura mempunyai keunggulan di sektor *knowledge, networking, financial resources* dan *technological advance*. Sementara Indonesia memiliki sumber daya alam dan mineral yang melimpah serta tersedianya tenaga kerja yang kompetitif.

Sebagai negara yang wilayahnya kecil, pasar domestiknya sangat terbatas dan sumber daya alamnya langka, Singapura sangat menggantungkan perekonomiannya pada perdagangan luar negeri. Oleh karena itu pula Singapura sangat berkepentingan terhadap sistem perdagangan internasional yang terbuka dan bebas di bawah naungan WTO. Guna mengamankan kepentingannya, Singapura tidak hanya mengandalkan pada proses negosiasi multilateral, sejak tahun 1999 Singapura telah mulai menjajagi bentuk-bentuk pengaturan perdagangan bilateral. Belakangan dengan tersendatnya proses negosiasi di WTO, Singapura semakin gencar menempuh langkah-langkah bilateral dan regional yang diyakini dapat mengakselerasi proses liberalisasi perdagangan dan memperkuat sistem perdagangan multilateral.

Hubungan bilateral Indonesia dan Singapura memiliki fondasi yang sangat kuat yang dibuktikan dengan telah ditandatanganinya berbagai Kesepakatan ataupun Perjanjian antara kedua negara. Selain itu, untuk fondasi kerjasama ekonomi khususnya antara Singapura dengan Batam dan Riau, kedua

negara memiliki *Legal Framework* yang kokoh dengan ditandatanganinya beberapa Persetujuan antara lain:

- a. *Basic Agreement on Economic and Technical Cooperation* yang ditandatangani di Singapura 29 Agustus 1974;
- b. Perjanjian Kerjasama Ekonomi dan Teknik RI-Singapura (1977);
- c. Perjanjian Kerjasama Ekonomi dan Teknik untuk Pengembangan Pulau Batam (31 Oktober 1980);
- d. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/P3B (1990);
- e. Persetujuan Kerjasama Ekonomi dalam rangka Pengembangan Propinsi Riau (28 Agustus 1990);
- f. Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M/IGA) ditandatangani pada 16 Februari 2005. Indonesia meratifikasi pada Februari 2006;
- g. *Framework Agreement on Economic Cooperation in the Island of Batam, Bintan and Karimun (SEZ's)*, 25 Juni 2006.

Pemberdayaan sektor swasta juga sudah kembali meningkat yang ditandai dengan cukup tingginya kegiatan kunjungan antara para pelaku usaha kedua negara. Sebagai hasilnya, semakin meningkatnya transaksi perdagangan dan investasi kedua negara. Sesuai dengan data dari *International Enterprise Singapore*, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-5 Singapura dengan total nilai perdagangan mencapai S\$ 54 milyar (2005) yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun 2004 yang mencapai nilai S\$ 30,1 milyar. Ekspor Indonesia ke Singapura mencapai S\$ 16,4 milyar sementara impornya mencapai S\$ 13,7 milyar.¹¹

Dalam kunjungan Presiden RI ke Singapura pada tanggal 12 November 2009, Presiden RI telah melakukan pertemuan bilateral dengan PM Lee Hsien Loong, kunjungan kehormatan kepada Presiden Singapura, S.R. Nathan dan *Minister Mentor* Singapura, Lee Kuan Yew. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden RI tersebut, PM Singapura menyampaikan beberapa pandangan antara lain :

¹¹ ©2005-2008 Embassy of the Republic of Indonesia, Singapore

1. Perlunya penyelenggaraan *retreat* para menteri kedua negara, untuk mereview hubungan yang selama ini telah terjalin dengan baik, sehingga kedua negara dapat melakukan *stock taking* atas berbagai capaian kerjasama, dan sekaligus memproyeksikan langkah-langkah yang perlu dilakukan;
2. Kerjasama kedua negara dalam konteks *Joint Steering Committee (JSC)* dan *Joint Working Group (JWG) on Economic Cooperation in the Islands of Batam, Bintan dan Karimun* telah meraih kemajuan terlepas dari sejumlah masalah yang harus diselesaikan.
3. Masih ada kesalahpahaman yang sering terjadi dalam upaya pengembangan hubungan kedua negara;
4. Komitmen mendorong peningkatan investasi Singapura di Indonesia yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja di Indonesia.
5. Perlunya ASEAN untuk terus menjadi *driving force* dalam pengembangan kerjasama kawasan. Raihan kerjasama antara ASEAN dengan negara-negara mitra wicara, seperti dalam kerangka ASEAN-AS dan ASEAN+3 mencerminkan sikap ASEAN yang selalu terbuka untuk bekerjasama dengan negara-negara di luar kawasan serta menekankan ASEAN menjadi *center* dalam setiap kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara.¹²

Komitmen-komitmen tersebut akan menjadi landasan kerjasama untuk dapat dilaksanakan pada tingkat yang lebih teknis dalam kerangka mencapai sasaran dan tujuan kerjasama bilateral Indonesia dan Singapura. Mekanisme *retreat* bilateral Indonesia dan Singapura yang akan dilakukan enam bulan mendatang akan menjadi media evaluasi terhadap posisi kerjasama Indonesia dan Singapura dan merumuskan target kemajuan yang hendak dicapai secara bersama-sama. Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya Departemen atau Instansi di Indonesia yang terkait dengan kerjasama Indonesia dan Singapura melakukan langkah-langkah koordinasi yang lebih intensif untuk dapat menyiapkan dan

¹² http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4159&Itemid=29

merumuskan evaluasi komprehensif kerjasama Indonesia dan Singapura dan merumuskan posisi dasar kerjasama tersebut pada isu-isu aktual yang menjadi pokok perhatian kedua negara. Sehingga mekanisme *retreat* bilateral Indonesia-Singapura enam bulan mendatang akan memenuhi target dan tujuan sesuai dengan keinginan untuk meningkatkan hubungan kerjasama bilateral kedua negara yang saling menguntungkan.

2.2.2. Hubungan Indonesia dan Singapura dalam Bidang Investasi

Indonesia telah menandatangani *Investment Guarantee Agreement / IGA* dengan Singapura pada tanggal 16 Pebruari 2005. Pada 1 Februari 2006 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut.

Menurut data BKPM, dalam periode 2000-2004 (lima tahun) investasi Singapura di Indonesia sebesar US\$ 6,4 milyar pada 868 proyek. Apabila dihitung secara persetujuan kumulatif (*cummulative approvals*) dari tahun 1967 sampai dengan bulan Februari 2005 tercatat sebesar US\$ 24,58 milyar dan menempati posisi ketiga besar, di bawah Jepang dan Inggris. Dalam tahun 2005 (Januari-Desember) investor Singapura telah menanamkan modalnya sebesar US\$ 3,69 milyar sekitar sepertiga dari total PMA (FDI) tahun 2005 dan merupakan investor pada peringkat pertama.

Pada bagian data BKPM yang lain menyebutkan, Singapura menempati urutan teratas dengan nilai investasi mencapai US \$ 806 juta (per 1 Januari – 30 Juni 2006) Meskipun lebih menyukai investasi bersifat “portofolio”, Singapura berhasil menggeser posisi Jepang yang sebelumnya merupakan investor terbesar di Indonesia. Investasi Singapura di Indonesia lebih banyak tersebar di wilayah Batam, Bintan dan Riau, namun Singapura juga memiliki kerjasama yang erat dengan berbagai propinsi di Sumatera.

2.2.3. Hubungan Indonesia dan Singapura dalam Bidang Pendidikan

Hubungan Indonesia Singapura difasilitasi oleh KBRI Singapura juga bertugas mengelola dan membina Sekolah Indonesia Singapura (SIS) yang jumlah muridnya lebih kurang 140 orang siswa, dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan tingkat Lanjutan Atas. Kepala Sekolah dan sebagian para guru adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Pendidikan Nasional namun sebagian guru adalah non-PNS. Pembinaan yang dilakukan, tidak hanya terhadap Kepala Sekolah dan para guru tetapi juga terhadap murid agar kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana secara baik dan benar. Disamping itu, pembinaan tersebut dimaksudkan juga agar SIS dapat bersaing dan menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah lokal sehingga perlu peningkatan kualitas pendidikan serta pengajaran. KBRI Singapura juga telah mengesahkan pembentukan Komite Sekolah yang bertugas sebagai forum para orang tua untuk memantau dan sekaligus memberikan masukan bagi peningkatan kegiatan SIS. Pada tahun pertengahan 2006, beberapa guru PNS telah selesai masa tugasnya dan pengganti mereka telah tiba.

Dalam rangka pengembangan kerjasama di bidang pendidikan antara Indonesia dengan Singapura, telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada 24 Juni 2005, yang meliputi kerjasama perguruan tinggi kedua negara (linkages antara National University of Singapore – NUS, Nanyang Technological University – NTU, dan Singapore Management University – SMU dengan beberapa universitas terkemuka di Indonesia), program sekolah kembar (kegiatan bersama seperti perkemahan, proyek dan pertukaran kunjungan), dan pelatihan bagi para pengajar.

Selain itu, di bidang pendidikan, KBRI Singapura juga senantiasa memfasilitasi beberapa kunjungan sekolah dan perguruan tinggi Indonesia ke Singapura untuk melakukan studi banding dan kerjasama khususnya pelatihan dan pertukaran pelajar dan guru.

2.2.4 Hubungan Indonesia dan Singapura dalam Bidang Perhubungan

Pada tanggal 23 September 2005, telah ditanda tangani MOU antara The Directorate General of Sea Transportation (Dirjen Hubla) dan The Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) tentang “*Cooperation on Human Resources Development of the Government Officer in the Maritime Field*”. MOU ini dilaksanakan berdasarkan MOU terdahulu yang ditanda tangani pada tanggal 22 Februari 2001. Kerangka kerjasama dalam MOU tersebut mencakup:

- a. Pemberian bantuan yang saling menguntungkan dalam upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan kemaritiman dan pengembangan serta pelaksanaan kursus-kursus termasuk program tambahan.
- b. Pengarahan dan pertemuan bilateral pegawai atau pejabat setiap enam bulan untuk saling bertukar pandangan dan pendapat.
- c. Memberikan peluang dan kesempatan untuk pegawai/pejabat Dirjen Hubla untuk melaksanakan pendidikan atau short course dalam bidang maritim seperti:
 1. *Marine Casualties and Investigation Accident*.
 2. TOT, ISM Code, ISPS Code dan *High Speed Craft*
 3. *FSI Training*
 4. *Hydrografic Survey*
 5. *Aid to navigation*
 6. *Pilot Up grading*
 7. *Ship Management*
 8. *Port Terminal, Port Economic, Port PlanningI*, dan lain-lain.

Dengan adanya MOU ini, menandakan adanya keinginan kedua negara untuk meningkatkan dan mempererat hubungan dan kerjasama yang telah dilakukan khususnya dalam hal meningkatkan standar operasional secara teknis dan administrative di kedua Negara dan masing-masing lembaga Pemerintahan. Adapun pendidikan pejabat/pegawai di lingkungan Dirjen Hubla di MPA Singapura sampai saat ini masih tetap berlangsung.

2.2.5 Hubungan Indonesia dan Singapura dalam Bidang Pertahanan

Saat ini Indonesia dan Singapura telah menjalin kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan cukup baik melalui berbagai latihan militer bersama, pengamanan Selat Malaka, maupun *Military Training Area*. Namun kerjasama dalam bidang MTA ini akan dikaji kembali karena Singapura selalu bermasalah dengan melanggar wilayah yang ditetapkan dan juga keinginannya untuk melibatkan Negara lain, selain itu masih ada hal-hal yang belum disepakati seperti lama kerjasama, pelibatan pihak ketiga seperti Amerika Serikat dan Australia, dan pengakuan hak tradisi Singapura di Laut Cina Selatan oleh Indonesia. Kerjasama ini dituangkan dalam Keppres 8/1996 tentang pemberian izin pemerintah Indonesia kepada Singapura untuk berlatih di sebagian wilayah Indonesia yang dikenal dengan MTA. Meskipun Singapura melalui Chief of RSAF-nya telah menyatakan tidak akan memperluas MTA ke wilayah Kalimantan, namun pemerintah tetap menghentikan MTA pada tahun 2003 karena berbagai hal yang belum disepakati mengenai MTA sendiri, seperti perjanjian ekstradisi dan masalah perbatasan Indonesia dan Singapura.

2.3 Potret Hubungan Bilateral Indonesia dan Singapura

Pada level ekonomi, banyak kritik menilai Indonesia sebagai *'back yard'* (kebun belakang) Singapura, sebagaimana terbukti dari dimasukkannya Batam dan Bintan dalam skema *'Free Trade Agreement'* (FTA) antara Singapura dan Amerika Serikat. Secara eksplisit Batam-Bintan tidak dinyatakan dalam FTA Singapura-AS. Namun dalam penerapan *'Rule of Origin'* (ROD), disepakati untuk menerapkan *'percentage criterion'* dimana 40% komponen lokal Singapura dari Batam-Bintan. Produk yang dapat dikaitkan dalam mekanisme tersebut meliputi 200% jenis produk hasil teknologi industri dan peralatan kesehatan. Secara ekonomi masuknya wilayah Batam-Bintan kedalam skema FTA Singapura dan AS merupakan peluang guna meningkatkan daya tarik kedua wilayah Indonesia ini sebagai daerah tujuan investasi, menjadikan keduanya sebagai basis manufaktur Singapura, yang pada akhirnya memberikan jaminan memasuki pasaran di Amerika Serikat. Masalahnya adalah, walaupun peluang ini sudah terbuka, Indonesia belum memiliki strategi besar guna mengoptimalkannya.

Masih pada level ekonomi, Indonesia telah membuka Kantor Promosi Jambi (*Jambi Promotion Office*) di Singapura, yang diresmikan pada tanggal 4 Desember 2003. Diharapkan hubungan bisnis antara pengusaha Jambi dan Singapura semakin dekat, dimana hubungan penerbangan langsung Jambi-Singapura membuat jalur bisnis yang selama ini melalui Jakarta semakin hidup dan berkembang pesat. Hasilnya, pengusaha Jambi mengeksport hasil produksi perkebunan dan perikanan, seperti karet, kopra, kopi, dan hasil laut ke Singapura, sedangkan Singapura mengeksport barang manufaktur, pakaian jadi, dan barang kebutuhan rumah tangga.

Masalah selanjutnya adalah proyek reklamasi di bagian selatan Singapura yang menjorok ke arah wilayah Indonesia akan berlangsung hingga tahun 2010, sedangkan pasokan pasir untuk keperluan reklamasi tersebut diperoleh dari Indonesia (kepulauan Riau). Akibat permintaan yang tinggi maka dampaknya telah menimbulkan penyelundupan dan kerusakan lingkungan. Dari sisi Indonesia, dorongan daerah untuk memperoleh pendapatan dari penjualan pasir semakin meningkat. Untuk proyek reklamasi tersebut, diperkirakan Singapura membutuhkan pasir sebanyak 1.615 milyar kubik. Dalam pelaksanaan ekspor pasir laut tersebut, saat ini Indonesia mulai mempertimbangkan aspek ekonomi, perdagangan, geostrategis, politik dan keamanan, serta lingkungan hidup. Kebijakan Indonesia yang mengaji ulang kebijakan ekspor pasir laut ke Singapura ini, untuk sementara waktu sangat merugikan perusahaan pemerintah (*Government Link Company*). Singapura selama ini melakukan reklamasi pantai dengan menggunakan pasir laut dari kepulauan Riau, yang dimasa depan akan mengaburkan perbatasan perairan sekaligus menjadi potensi konflik perbatasan di Selat Philips dan Selat Malaka.

Secara ekonomi, kritik Singapura atas masalah perdagangan dan investasi di Indonesia menjadi referensi bagi para pengusaha dan investor asing lainnya, baik yang berkedudukan di Singapura maupun di luar Singapura. Perkembangan situasi politik, social dan ekonomi yang banyak dikeluhkan oleh investor Singapura di Kawasan Batamindo Industrial Park (BIP) meliputi hal seperti:

a) Ketidakstabilan sosial dan keamanan di kepulauan Riau;

- b) Masalah perburuhan;
- c) Menurunnya daya saing investasi sehubungan dengan meningkatnya Upah Minimum Regional (UMR); dan
- d) Ketidakpastian ekonomi dan politik termasuk penerapan Otonomi Daerah.

Secara politik, Singapura sangat menghormati Indonesia, dan membuktikannya dalam banyak kasus. Singapura adalah negara pertama yang membantu saat Indonesia menghadapi bencana Tsunami di Aceh (2004), dan bencana gempa bumi di Jogjakarta (2006). Singapura adalah satu-satunya negara yang terus menerus mengirim personil terbaiknya dalam mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando (AD, AU), dan selalu menjadi lulusan terbaik.

Secara pertahanan dan keamanan, Singapura kurang berkenan melihat sebuah Indonesia yang mandiri secara pertahanan keamanan, sehingga mampu menjadi kekuatan yang mengkhawatirkan Singapura. Penangkapan kedua WNI di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat (April 2006) dalam hal ini, tidak lepas dari penyadapan terhadap surat elektronik (E-mail) Hadianto yang dikirimkan ke *Orchard Logistic Service*. Hal ini hanya mungkin terjadi pasca kepemilikan Sing-Tel (perusahaan telekomunikasi asal Singapura) dalam PT. Indosat.